

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG

Kabupaten Batang merupakan kabupaten yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Kota Batang merupakan ibukota Kabupaten Batang yang letaknya berada di ujung barat laut kabupaten, sebelah timur Kota Pekalongan. Dengan demikian, penduduk biasanya menganggap Kota Batang merupakan bagian dari Kotamadya Pekalongan karena jarak keduanya cukup dekat.

2.1 Organisasi Masyarakat Sipil Kabupaten Batang

Pada masa Orde Baru presiden Soeharto, selama 32 tahun perkembangan masyarakat biasa terhambat dan lemahnya independen serta suara penguasa, karena dianggap bahwa keputusan yang terbuka akan merugikan kestabilan negara. Dengan demikian, pemerintahan Orde Baru ingin negara Indonesia menjadi negara yang kuat namun masyarakatnya lemah. Di bawah pemerintah Orde Baru, tidak jarang asosiasi yang dikendalikan negara dan tidak pantas dianggap sebagai masyarakat sipil.

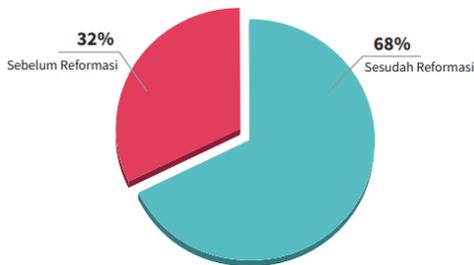
Hasil dari pengebirian masyarakat sipil yang sistematis ini adalah melemahnya kemampuan masyarakat untuk memobilisasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Akibatnya, kelompok masyarakat dan politik yang berkembang bukan berasal dari akarnya, melainkan dari mahasiswa, akademisi, cendekiawan, dan lainnya yang berkomitmen aktif secara sosial dan politik. Para anggota organisasi ini

ingin mengetahui kelemahan rakyat Indonesia dan mencoba berbicara atas nama mereka sambil berusaha mengobarkan kembali minat dan tekad mereka sendiri²⁹.

Dengan tumbanganya Suharto dan dimulainya era modern yang tengah berlangsung, organisasi masyarakat sipil mulai bermunculan di berbagai bidang, tanpa tekanan yang ada pada mereka. Selain itu kebangkitan Ornop juga mendukung mereka karena sebelumnya berada di tekanan pemerintah. Situasi Indonesia saat ini lebih teratur bagi perkembangan masyarakat sipil yang demokratis untuk memperbaiki fungsi pranata-pranata masyarakat sipil yang sebelumnya hanya tinggal nama. Gambaran kondisi masyarakat sipil di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi juga dilihat dari perkembangan pembentukan Organisasi Masyarakat Sipil, seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Presentase CSOs yang Berdiri Sebelum dan Sesudah Reformasi



Sumber: Ah Maftuchan, dkk, *Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia*

²⁹ Forum untuk Reformasi Demokratis, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, Stockholm: International IDEA, 2000, hlm. 108

Berdasarkan gambar 2.2, dapat terlihat presentase OMS atau CSOs pasca reformasi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat sipil lebih pesat pasca reformasi. Mekanisme akuntabilitas dan partisipasi masyarakat juga mulai terbuka. Maraknya gerakan masyarakat sipil juga tidak terlepas dari masifnya penyebaran literasi di masyarakat.

Pasca tumbanganya Orde Baru, negara Indonesia yang lebih kondusif menjadi titik tolak kebangkitan gerakan organisasi kerakyatan di berbagai sektor, seperti buruh, tani, nelayan, yang selama ini bungkam. Pada masa reformasi, adanya keterbukaan dan tidak adanya tindakan represif memungkinkan mereka untuk semakin banyak memimpin gerakan sosial dan politik. Di Kabupaten Batang sendiri merupakan salah satu yang sudah mulai ada gerakan melalui organisasi-organisasi masyarakat. Kemudian organisasi masyarakat sipil juga turut berkembang di Kabupaten Batang seperti halnya di daerah-daerah lain.

Tahun 2019, pemerintah Kabupaten Batang menerbitkan Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dibentuknya Badan Kesbangpol ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam proses kemajuan organisasi masyarakat sipil, karena Badan Kesbangpol memiliki fungsi dalam pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Batang. Badan Kesbangpol juga bertanggung jawab dalam mendata organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum ataupun tidak.

Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol, pada tahun 2014 hingga 2020, terdapat 25 organisasi masyarakat sipil yang resmi terdaftar dan memiliki dasar pendiriannya masing-masing. Organisasi-organisasi tersebut terbentuk dari berbagai kelompok dengan isu yang berbeda-beda. Selengkapnya tentang data organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Lampiran 1. Harapannya, organisasi masyarakat sipil yang ada tersebut dapat menjadi elemen kritis pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan publik dan menjunjung tinggi nilai dan norma demokrasi.

2.2 Gambaran Korupsi di Kabupaten Batang

Korupsi yang mana merupakan tindakan menyimpang dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, umum menjerat para pemangku jabatan, baik di lingkup pemerintahan desa maupun daerah. Salah satu kasus korupsi yang fenomenal di Kabupaten Batang ialah korupsi oleh Bambang Bintoro, Mantan Bupati Batang yang telah menjabat selama dua periode (tahun 2002 – 2007, dan 2007 – 2012). Bambang Bintoro menggunakan dana APBD dari pos Sekretariat Pemerintah Kabupaten Batang untuk pengadaan premi asuransi yang dibagikan kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Batang periode 1999 - 2004 sebesar 769 Juta Rupiah. Bambang Bintoro membagi-bagikan uang tersebut sebagai upaya lobby agar Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati (LPJ) diterima oleh anggota dewan. Berdasarkan pemeriksaan BPKP Jawa Tengah pendanaan asuransi tersebut

melanggar hukum dan merugikan keuangan negara karena menggunakan kas daerah berupa premi asuransi yang sejak tahun 2002 telah dihapuskan.

Meskipun terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka sejak tahun 2008, proses penyidikan kejaksaan terhadap Bambang Bintoro terkendala surat ijin pemeriksaan dari Presiden terhadap kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, sehingga kasus tersebut baru dapat disidangkan tahun 2012 setelah masa jabatan bupati selesai. Karena terbukti bersalah menyalahgunakan APBD, Pengadilan Tipikor Semarang memvonis Bambang Bintoro 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 Juta subsidi dua bulan kurungan. Selain Bambang Bintoro, Pengadilan Tipikor Jawa Tengah juga menetapkan dua Pimpinan DPRD periode 1999- 2004 sebagai tersangka dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Batang, ketiganya divonis satu tahun penjara³⁰.

Pada tahun 2010 Kejaksaan Agung menunjuk Johny Manurung SH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang. Setelah ditunjuk menjadi Kajari, gebrakan langsung dilakukan pada bulan pertama masa jabatannya dengan menaikkan status hukum beberapa kasus korupsi di Kabupaten Batang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan perubahan status hukum tersebut, Kejaksaan sudah menetapkan nama-nama tersangka. Kasus tersebut adalah korupsi proyek pembangunan Puskesmas II Kabupaten Batang, Puskesmas Brojong Kalibelo Tersono, Puskesmas Kuripan Subah, dan Proyek Jalan Nganjir dengan tersangka utama Kepala Dinas

³⁰ Putur Aryo Saputro, "Demokrasi dan Representasi Populer: Studi Kasus Kabupaten Batang", *Artikel Politik Ekonomi dalam Institute for Strategic Initiatives*, 2017, hlm. 4

Kesehatan, Kepala Bina Marga dan Sumber Daya Air Mineral Kabupaten Batang dan rekanan pelaksana proyek. Selain empat kasus yang sudah ditetapkan tersangkanya, Kajari juga mulai memproses sembilan kasus korupsi lain yang melibatkan lingkaran Bambang Bintoro³¹.

Kemudian pada periode kepemimpinan berikutnya, Yoyok Sutadi, Kabupaten Batang telah melakukan langkah-langkah untuk efisiensi anggaran daerah dengan cara dibuka kepada publik, dibuat setransparan mungkin dan melibatkan banyak kalangan untuk diberikan masukan. Meski demikian korupsi masih terus menjadi persoalan dan masih berlanjut, walaupun tidak sebesar pada periode sebelumnya. Adapun data penanganan kasus korupsi di Kabupaten Batang tahun 2016-2017 di Kejaksaan Negeri dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Batang Tahun 2016-2017

No	Rincian	Tahun	
		2016	2017
1	Penyelidikan / <i>Research</i>	3	3
2	Penyidikan / <i>Investigation</i>	3	2
3	Penuntutan / <i>Prosecution</i>	4	4
4	Eksekusi / <i>Execution</i>	9	3

Sumber: BPS Kabupaten Batang (2017)

Berdasarkan data di atas, sejumlah 12 kasus korupsi telah mencapai tahap eksekusi. Tahun 2016 jumlah kasus yang dieksekusi lebih tinggi dibanding 2017.

³¹ *Ibid*, hlm. 6

Selain itu, jumlah kasus pada tahap penyidikan juga lebih tinggi di tahun 2016. Untuk kasus pada tahap penyelidikan dan penuntutan jumlahnya sama.

Mulai tahun 2018, penanganan kasus korupsi dilaksanakan secara terpusat di Tipikor Semarang. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang (SIPP-PN Semarang), sejak tahun 2019 sampai 2022 terdapat 6 kasus korupsi dari Kabupaten Batang yang sudah ditindak dan diputuskan. Berikut ini merupakan kasus-kasus korupsi tahun 2019-2022 yang telah diputuskan dan diberitakan di media.

1. Kasus korupsi penyelewengan Dana Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang oleh Darsani selaku Kepala Desa. Kasus ini bermula pada tahun 2017, ketika PT PLN Persero membayar ganti rugi sebesar Rp 573.719.000,00 karena membebaskan tanah Kas Desa Ponowareng yang terdampak pembangunan PLTU Batang. Akan tetapi, pemimpin desa kepala desa menggunakan uang sebesar Rp 433.115.000,00 yang akan dipakai untuk mencari tanah baru, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 151.056.800,00³².
2. Kasus korupsi penyelewengan Dana Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang oleh M Huda selaku Kepala Desa. Kasus ini merupakan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa terkait penggunaan Dana

³² Radarpekalongan.co.id, “Dua Kades di Batang Ditetapkan Tersangka” diakses dari <https://radarpekalongan.co.id/58705/dua-kades-di-batang-ditetapkan-tersangka/> pada Selasa, 20 September 2022

Desa tahun 2017 sebesar Rp 746.722.000,00. Kasus ini selesai ditindak dan sudah ada putusannya pada tahun 2020³³.

3. Kasus korupsi pengelolaan APBDes Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang oleh Rusnadi selaku Kaur Keuangan Desa dan Bendahara Desa. Kasus ini merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangannya sejak Juni 2018 sampai Juli 2019 sehingga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 768.999.473,00³⁴.
4. Kasus korupsi Dana Desa Bismo, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang oleh Agus Sugiarto selaku mantan Kepala Desa. Kasus ini merupakan penyalahgunaan anggaran Dana Desa tahap I, II, dan III pada tahun anggaran 2017 dan 2018, serta tahap I tahun anggaran 2019, dengan total kerugian sebesar Rp 741.058.834,00³⁵.
5. Kasus korupsi pengelolaan keuangan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang oleh Evariawan Sukmahadi selaku mantan Direktur Perusda Aneka Usaha. Kasus ini merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang selaku Direktur Perusda

³³ *Ibid*

³⁴ Radarpekalongan.co.id, “Bendahara Desa Kandeman Dituntut 4 Tahun” diakses dari <https://radarpekalongan.co.id/126701/bendahara-desa-kandeman-dituntut-4-tahun/> pada Selasa, 20 September 2022

³⁵ Radarpekalongan.co.id, “Diduga Korupsi Dana Desa Selama 3 Tahun, Mantan Kades Bismo Ditangkap” diakses dari <https://radarpekalongan.co.id/123739/diduga-korupsi-dana-desa-selama-3-tahun-mantan-kades-bismo-ditangkap/> pada Selasa, 20 September 2022

Aneka Usaha Kabupaten Batang atas penyalahgunaan keuangan perusahaan yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 785.164.562,00³⁶.

6. Kasus korupsi penyalahgunaan APBDes Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang oleh Taryoto selaku mantan Sekretaris Desa. Uang APBDes tahun 2017 hingga 2019 disalahgunakan berkedok kegiatan desa, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Total kerugian sebanyak Rp 246.645.505,00³⁷.
7. Kasus korupsi penyalahgunaan APBDes Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang oleh Kusno Aji selaku mantan Kepala Desa. APBDes Tahun Anggaran 2017-2018 disalahgunakan yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 85.784.566,08³⁸.

Selain data yang tertera di atas, masih 3 kasus korupsi di lingkup pemerintah desa yang sedang menjalani proses persidangan (belum ada putusan). Adapun detail perkara ketujuh kasus tersebut yang telah dipublikasikan di SIPP-PN Semarang selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 2. Korupsi Dana Desa yang menjerat Kepala desa menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Batang untuk terus menyawaasi agar tidak terulang kasus serupa. Kekhawatiran masyarakat akan

³⁶ Radarpekalongan.co.id, “Mantan Direktur Perusda Batang Dituntut Satu Tahun Dua Bulan dan Denda Rp50 Juta” diakses dari <https://radarpekalongan.co.id/143290/mantan-direktur-perusda-batang-dituntut-satu-tahun-dua-bulan-dan-denda-rp50-juta/> pada Selasa, 20 September 2022

³⁷ Radarpekalongan.co.id, “Diduga Korupsi APBDes, Sekdes Karangtengah Ditahan Kejari Batang”, diakses dari <https://radarpekalongan.co.id/139667/diduga-korupsi-apbdes-sekdes-karangtengah-di-tahan-kejari-batang/> pada Selasa, 20 September 2022

³⁸ Catatanrakyat.com, “Mantan Kades Blado, Batang Jalani Sidang Perdana Korupsi Dana Desa” diakses dari <https://catatanrakyat.com/mantan-kades-blado-batang-jalani-sidang-perdana-korupsi-dana-desa/> pada Rabu, 7 Desember 2022

maraknya kasus korupsi menyebabkan terbentuknya organisasi masyarakat sipil seperti OMS yang kemudian merancang beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang.

2.3 Organisasi Masyarakat Sipil Anti Korupsi

Masyarakat Kabupaten Batang semakin menaruh perhatiannya terhadap korupsi ketika ada pimpinan daerah yang melakukan tindakan korup. Seperti halnya berkaitan dengan kasus korupsi di Kabupaten Batang itu sendiri, LSM Gerakan Tangkap Koruptor atau Gertak merupakan LSM yang melaporkan kasus korupsi Bambang Bintoro ke pengadilan Tipikor Jawa Tengah, yang kemudian menyeret sejumlah pejabat lainnya. LSM Gertak didirikan oleh Agus Condro, mantan anggota DPR RI, dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan, karena pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif pada saat itu dinilai tidak optimal. Kemudian setelah adanya fenomena tersebut, gerakan anti korupsi yang terorganisir semakin banyak, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.2

LSM Anti Korupsi yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2005-2022

No	Nama Organisasi	Tahun Periode
1	Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK)	2005 - 2010
2	Gerakan Rakyat Anti Suap dan Korupsi (GRASI)	2008 - 2013
3	Gerakan Nasional Anti Korupsi (GRANAT)	2008 - 2013
4	Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara Indonesia "KPK - PANRI"	2017 - 2022

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Batang

Perkembangan OMS anti korupsi di Kabupaten Batang terus berjalan beriringan dengan kasus-kasus korupsi terbaru yang ada di lingkungan pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan juga proyek-proyek fisik. Setelah berdinamika dalam pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Bambang Bintoro, LSM Gertak mulai tidak bersuara lagi. Namun demikian, beberapa anggota LSM Gertak justru bergabung dalam Komunitas Joglo untuk melakukan diskusi-diskusi politik dan agenda apa saja yang akan dilakukan sebagai representasi masyarakat.

Komunitas Joglo kemudian mengembangkan fungsi dan perannya dengan membentuk sebuah lembaga yang lebih teorganisir, yakni LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). LSM ini berdiri pada periode kepemimpinan 2014-2019 dan resmi dilantik pada tahun 2017. LSM GMPK dipimpin oleh Taufik Surojo, yang mana sebelumnya aktif dalam Forum Anti Korupsi (FAK) Kabupaten Batang.

Gambar 2.2
Pelantikan Kepengurusan GMPK



Sumber: <https://www.pekalongan-news.com/2017/11/resmi-dilantik-gmpk-batang-siap-perangi.html>

Selain LSM Gertak, LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) juga mengalami perubahan perwajahan. LSM tersebut kemudian berubah nama menjadi Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GN-PK). Hal ini berpengaruh pada fokus gerakan anti korupsi dengan cara mencegah. Lantas GN-PK resmi menjadi Ormas berbadan hukum pada tahun 2015 dan berubah nama menjadi Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Batang. Sejak berdirinya organisasi tersebut hingga saat ini telah mengalami reorganisasi dan pelantikan sebanyak dua kali; periode pertama dipimpin oleh Izza Nur Kalam, dan periode kedua dipimpin oleh Radita Erlangga

Gambar 2.3

Pelantikan Kepengurusan GNPK-RI Periode 2021-2026



Sumber: <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=8253>